

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SEREANG KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Mursalim S.
mursalim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Desa Sereang, dengan jumlah penduduk 2.040 orang. Sampel yang diinginkan peneliti adalah 10% atau 180 orang, diambil berdasarkan teknik Purposive Sampling. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif Kuantitatif dan jenis penelitian adalah Eksprimen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuisisioner, dan Studi Kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian digunakan dengan cara teknik analisis data dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Hasil analisis berupa Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Sederhana dan Uji Hipotesis, dengan menggunakan Skala Likert. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah desa adalah 54% dari yang dihasilkan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah 100%. dilihat dari hasil olah data angket dari setiap indikator pertanyaan variabel (X) Kebijakan. dan pembangunan desa adalah 71% dari yang dihasilkan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah 100%. dilihat dari hasil olah data angket dari setiap indikator pertanyaan variabel (Y) Pembangunan. Kebijakan Pemerintah Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Desa, dengan nilai probabilitas berada di bawah 0.05 dilihat dari nilai thitung > nilai ttabel dengan nilai $6.971 > 1.040$. Artinya, secara otomatis H_a diterima dan H_0 ditolak yang menjelaskan bahwa koefisien regresi signifikan atau variabel Kebijakan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan (Y). Artinya, secara otomatis H_a diterima dan H_0 ditolak yang menjelaskan bahwa koefisien regresi signifikan atau variabel kebijakan pemerintah desa berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan desa.

Kata Kunci : Kebijakan dan Pembangunan

Abstract

This study aims to find out How Government Policies in Development In Rural District of Maritengngae Sidenreng Sereang Rappang. The population in this study are all Sereang Village community, with a population of 2,040 people. The desired sample the researcher is 10% or 180 people, taken by purposive sampling technique. This type of research is a quantitative and descriptive type of research is experimental. Data collection techniques used in this study is the observation, questionnaire and literature study. The collected data is then used by means of data analysis techniques with SPSS 16.0 for Windows. The results of such analysis Descriptive Statistics, Quality Test Data, Test Assumptions Classic, Simple Regression Analysis and Testing Hypotheses, using a Likert Scale. The results of this study indicate that the village government policy is 54% of the produced. While the expected results was 100%. seen from the results of the questionnaire data if any questions indicator variable (X) of the Policy. and the development of the village is 71% of the produced. While the expected results was 100%. seen from the results of the questionnaire data if any questions indicator variable (Y) Development. The village government policies significantly affect pembangunan village, with a probability value was under 0:05 dilhat of tcount> table value to the value of $6,971 > 1,040$. That is, automatically H_a H_0 accepted and rejected explaining that a significant regression coefficient or policy variable (X) significantly influence the development (Y). That is, automatically H_a H_0 accepted and rejected explaining that a significant regression coefficient or village government policy variables significantly influence the development of the village.

Keywords: Policy and Development

A. PENDAHULUAN

Negara yang memegang penuh tanggung jawab pada kehidupan rakyatnya harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan publik yang dibuat dan dikeluarkan oleh negara diharapkan dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan tersebut. Kebijakan Publik adalah suatu keputusan yang dimaksudkan untuk tujuan mengatasi permasalahan yang muncul dalam suatu kegiatan tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Untuk memahami lebih jauh bagaimana kebijakan publik sebagai solusi permasalahan yang ada pada masyarakat, kita harus memahami dulu apa dan seperti apa kebijakan publik itu sendiri. Berikut adalah definisi-definisi kebijakan publik menurut para ahli kebijakan publik.

Thomas R. Dye (Soluhuddin, 2009), menjelaskan bahwa analisis kebijakan adalah deskripsi dan eksplanasi terhadap sebab-sebab dan konsekuensi berbagai macam kebijakan publik. Analisis kebijakan mempelajari apa yang dikerjakan pemerintah, Konsep lainnya adalah Ann Majchrzak (Soluhuddin, 2009), menyatakan bahwa penelitian kebijakan adalah proses pelaksanaan riset atau analisis terhadap permasalahan sosial yang fundamental dengan tujuan memberikan rekomendasi kepada policy maker agar dapat melakukan langkah-langkah pragmatis guna memecahkan masalah tersebut.

Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Fenomena kesenjangan perkembangan antar wilayah di suatu negara, meliputi wilayah-wilayah yang sudah maju dan wilayah-wilayah yang sedang berkembang memicu kesenjangan sosial antar wilayah. Salah satu faktor terjadi kesenjangan antara desa dan kota karena pembangunan ekonomi sebelumnya cenderung bias kota (urban bias). Sebagai dampak pemberlakuan model pembangunan yang bias perkotaan, sektor pertanian yang identik dengan ekonomi perdesaan mengalami kemerosotan.

Dibandingkan dengan pertumbuhan sektor industri dan jasa, yang identik dengan ekonomi perkotaan, sektor pertanian menjadi semakin tertinggal. Untuk mengatasi hal tersebut, setiap negara mencoba melakukan tindakan intervensi untuk mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah dengan melakukan pembangunan pedesaan.

Ada 2 faktor pembangunan yaitu : 1) pembangunan fisik , 2) pembangunan non fisik, dari beberapa faktor pembangunan tersebut pemerintah belum memberikan kebijakan pembangunan kepada masyarakat, padahal masyarakat desa sangat memerlukan kebijakan tersebut karna adanya beberapa usaha-usaha fisik maupun non fisik yang di dirikan masyarakat tetapi tidak pernah diberikan kebijakan pembangunan oleh pemerintah, sedangkan menurut p. Siagan (Safi'i, 2009), mengemukakan konsep dalam pembangunan, yakni adanya usaha dari masyarakat dan pemerintahannya, jadi dari konsep yang di kemukan oleh p.siagan (Safi'i, 2009), menunjukkan bahwa pemerintah dan masyarakat harus bisa bekerja sama demi mengembangkan pemerintah desa dan masyarakat desa.

Namun kenyataan yang terjadi di sereang pemerintah desa dalam mengeluarkan kebijakan mengenai pembangunan desa lebih berpihak pada pembangunan di kawasan tempat tinggalnya hal ini menimbulkan kecemburuan sosial dari masyarakat sebagian yang terletak di dusun lainnya, seperti pembangunan fisik: saluran irigasi lingkungan masyarakat ,lapangan sepak bola tidak tereliasasi,kelompok tani kurang di perhatikan, komunitas pemuda desa tidak berjalan, dan jalan tani masih banyak yang rusak tidak di diperhatikan .inti dari pembangunan desa yaitu pembgunan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Maka pada saat ini apa yang diinginkan oleh masyarakat di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang ,mengenai pembangunan di Desa belum seutuhnya tercapai dengan apa yang telah menjadi kebijakan pemerintah di Desa sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

(fermana, 2009), Titk awal yang bagus untuk menjelaskan kata publik adalah dari bangsa yunani dan romawi. Dari bangsa romawi kita mengambil konsep publik dan privat. Bangsa romawi mendefinisikan kedua istilah tersebut dalam term res publica dan res

priva. Gagasan publik dan privat pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah *konion* (yang dapat diartikan publik) dan *idion* (yang bisa diartikan privat).

Gagasan yang jelas membedakan ruang privat dalam ruang publik adalah ruang privat merupakan ruang yang tidak merugikan orang lain. Persoalan tidak merugikan orang lain selalu berubah dan berkembang seiring dengan banyaknya informasi tentang persoalan sosial dan persoalan lainnya yang berhubungan dengan konsekuensi publik dari tindakan privat, dan karenanya melahirkan desakan untuk melahirkan perbaikan (*reform*). Pada intinya, proses merugikan orang lain pembahasannya bersifat dinamis dan harus diletakkan dalam debat publik yang masuk akal (*reasonable*). Selain dari masalah tidak merugikan orang lain adalah berisi ruang publik.

Menurut Thomas R. Dye (Widodo, 2009) proses kebijakan publik meliputi beberapa hal yaitu :

1. Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*), identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
 2. Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
 3. Perumusan kebijakan (*policy formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif.
 4. Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*) pengesahan kebijakan melalui tindakan politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.
 5. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktifitas agen eksekutif yang terorganisasi.
 6. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*) evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers dan masyarakat (publik).
- kuncoro (Safi'i, 2009), teori pembangunan yang ada sekarang ini tidak

mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh karena itu, suatu pendekatan alternatif untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Pendekatan ini merupakan sintesis dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan ini memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

(Siagan, 2009), mendefinisikan pembangunan adalah: "Suatu usaha atau serangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintahan dalam usaha pembinaan bangsa." Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis.

Lingkungan internal yang dianalisis adalah kekuatan dan kelemahan yang terdapat dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Adapun faktor kekuatan yaitu :

1. Adanya pra-musbang yang dilakukan di tingkat Dusun/Lingkungan, maka masyarakat dapat menyusun rencana pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan menumbuhkan peran serta masyarakat dalam mengelola pembangunan yang telah disepakati bersama.
2. Adanya musyawarah pembangunan Desa/Kelurahan. Kegiatan ini merupakan forum kegiatan penyusunan rencana dengan bahan dasar dari pra-musbang.
3. Adanya program kerja yang terencana merupakan suatu sasaran kegiatan yang sudah direncanakan untuk dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan.
4. Adanya dana merupakan stimulan bagi usaha ekonomi produktif dan pengembangan lembaga perkreditan Desa/Kelurahan dalam rangka mendorong

pemupukan modal di pedesaan melalui usaha ekonomi desa simpan pinjam.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Namun, untuk membantu dalam analisa data, tulisan ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara Studi Kepustakaan, Observasi, Wawancara, Kuesioner. Data yang diperoleh pada saat penelitian akan dianalisis secara kuantitatif. Penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari responden atau sumber data lain terkumpul. Data yang telah terkumpul dilakukan analisis regresi Sederhana dengan bantuan program SPSS 16.0 for windows. Hasil analisis berupa statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi Sederhana dan uji hipotesis. Langkah terakhir adalah mendeskripsikan hasil analisis data sehingga pada akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan. Data yang diperoleh melalui kuesioner dianalisis dengan menggunakan Skala Likert.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan pemerintah terhadap pembangunan di desa Sereang ditandai dengan Kebijakan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan mampu dengan rata-rata 52,75 %, Penyusunan Agenda dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan mampu dengan rata-rata 53,75 %, Perumusan Kebijakan dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan mampu dengan rata-rata 51,5 %, Pengesahan Kebijakan dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan mampu dengan rata-rata 55,25 %, Implementasi Kebijakan dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan mampu dengan rata-rata 54,5 %, Evaluasi Kebijakan dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan mampu dengan rata-rata 55,5 %,

Adanya Pra-Musbang dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan tidak baik dengan rata-rata 72,25 %, Adanya Musyawarah Pembangunan dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan baik dengan rata-rata 71,75 %, Adanya Program Kerja dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan baik dengan rata-rata 72 %, Adanya Dana Stimulan dalam pembangunan desa, dapat dikategorikan baik dengan rata-rata 71 %.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka langkah terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah menarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 54% dari yang dihasilkan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah 100%. dilihat dari hasil olah data angket dari setiap indikator pertanyaan variabel (X) Kebijakan.
2. Kebijakan Pemerintah Dalam Pembangunan Di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah 71% dari yang dihasilkan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah 100%. dilihat dari hasil olah data angket dari setiap indikator pertanyaan variabel (Y) Pembangunan.
3. Kebijakan Pemerintah Desa berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan Desa, dengan nilai probabilitas berada di bawah 0.05 dilihat dari nilai thitung > nilai ttabel dengan nilai 6.971 > 1.040. Artinya, secara otomatis H_a diterima dan H_0 ditolak yang menjelaskan bahwa koefisien regresi signifikan atau variabel Kebijakan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap Pembangunan (Y).

E. REFERENSI

- Fermana, S. (2009). *Kebijakan publik*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media Grup.
- Safii. (2009). *Perencanaan pembangunan daerah*. . Malang: Averroes.
- Siagan, S. P. (2009). *Perencanaan pembangunan daerah*. Malang: Averroes.
- Soedjono. (2009). *Perencanaan penggunaan di indonesia*. Surabaya: Airlangga university press. .
- Soluhuddin. (2009). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava media.
- Widodo, J. (2009). *Analisis kebijakan publik*. Medan: Bayumedia.
- Widodo, J. (2009). *Kebijakan publik*. Malang: Bayu media.